

Studi Tentang *Political Tie*, Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank di Indonesia

Elisa Tjondro¹ & Basuki²

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Surabaya

Email: elisatjondro@petra.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya

Email: basuki@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan data kredit bank untuk mempelajari pengaruh hubungan politik (*political tie*) terhadap penilaian *financial leverage* dan profitabilitas perusahaan dalam keputusan pemberian kredit bank di Indonesia. Jumlah sampel sebesar 1465 pengamatan. Penelitian ini menggunakan *moderated regression analysis (MRA)* dalam analisis data. Hasil penelitian menemukan *political tie* mempengaruhi penilaian profitabilitas perusahaan dalam keputusan pemberian kredit bank. Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih rendah terbukti menerima kredit bank yang lebih besar karena mereka memiliki *political tie* (*rent-seeking hypothesis*). Namun penelitian ini menemukan *political tie* tidak mempengaruhi penilaian *financial leverage* dalam keputusan pemberian kredit bank. Hal ini sekaligus mendukung penelitian Faccio (2010), Fisman (2001), dan Backman (2001). Kondisi Indonesia yang memiliki regulasi institusional yang lemah dan asimetri informasi yang tinggi merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki *political tie*. Hal ini menyebabkan perbankan lebih mempercayai *political tie* sebagai indikator profitabilitas.

Kata kunci: *Political tie, financial leverage, profitabilitas, kredit bank, rent-seeking hypothesis, politically exposed person, BUMN.*

ABSTRACT

This study uses bank loan data to examine the effect of (political tie) between the company and the government on the assessment of companies financial leverage and profitability in the bank lending decisions in Indonesia. The numbers of samples are 1465 observations. This study uses moderated regression analysis (MRA). The study finds that a political tie affect corporate profitability assessment in bank lending decisions. Firms with lower profitability receive larger bank loan because their political tie (rent-seeking hypothesis). However, this study inds that a political tie does not affect the assessment of financial leverage in bank's lending decisions. This finding also supports Faccio (2010), Fisman (2001), and Backman (2001). Indonesia condition which has a weak institutional regulation and high information asymmetry is beneficial for companies that have a political tie. This leads to more trusted political tie as an indicator of the profitability.

Keywords: *Political tie, financial leverage, profitability, bank loan, rent-seeking hypothesis, politically exposed person, state-owned enterprises (SOEs).*

PENDAHULUAN

Penelitian oleh Leuz dan Oberholzer-Gee (2003) menyatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat *mandatory disclosure* dan *low transparency facilities* yang rendah. Hal ini merupakan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan

yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah (*political tie*), karena semakin sedikit informasi akuntansi yang dapat diperoleh mengenai perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai dari *political tie* tersebut.

Terdapat beberapa alasan untuk mempercayai bahwa perusahaan yang memiliki hubungan

politik dengan pemerintah (*political tie*) memperoleh keputusan kredit bank yang lebih menguntungkan dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah. Pandangan ini dikenal dengan *reputation of profitability*. Pandangan mengenai *reputation of profitability* dikemukakan oleh Fisman (2001) dan Faccio (2002) yang menyatakan bahwa hubungan politik yang kuat menghasilkan *business opportunities* dan meningkatkan nilai perusahaan. Dine (2005), Fishman (2001), Johnson dan Mitton (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *political tie* memiliki kinerja yang lebih baik atau profit yang tinggi dibanding perusahaan yang tidak memiliki *political tie*, pada kondisi regulasi institusional yang lemah. Pandangan ke-2 dikenal dengan *rent-seeking hypothesis*. Pandangan mengenai *rent-seeking hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *political tie* memiliki kemampuan mengalihkan pinjaman bank bagi mereka, tanpa mempertimbangkan apakah perusahaan ini memiliki proyek yang menguntungkan atau tidak (Zheng dan Zhu 2009).

Sebuah studi yang dilakukan oleh Zmijewski, yang diambil dari Palepu *et al.* (2004) menjelaskan bahwa faktor yang paling berguna dalam memprediksi kebangkrutan untuk satu tahun kedepan adalah profitabilitas, volatilitas, dan *financial leverage* (*hard information*). Namun *earnings* berbasis nilai historis memiliki kelemahan utama yaitu diijinkannya pemilihan berbagai metode akuntansi (*accruals*) oleh standar akuntansi, dan hal ini mempengaruhi laba bersih dalam satu periode. Selain itu, transparansi laporan keuangan yang rendah di Indonesia, mengurangi *earnings informativeness* laporan laba rugi di Indonesia. Hal ini tentu mendorong analis kredit mencari sumber informasi lain, yaitu: *political tie* (*soft information*) dalam menganalisis profitabilitas perusahaan.

Penelitian mengenai *political tie* terhadap preferensi kredit bank di Cina oleh Zheng dan Zhu (2009) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *political tie* memiliki sensitifitas lebih kecil dalam penilaian profitabilitas dan *tangibility* dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Konsekuensinya adalah perusahaan yang memiliki *political tie* lebih tidak efisien dalam melakukan investasi dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Relasi antara *political tie* dalam kredit dengan efisiensi investasi semakin kuat untuk perusahaan yang dimiliki pemerintah dan perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah. Beberapa penelitian mengenai keuntungan yang diperoleh perusahaan yang memiliki *political tie* di Indonesia antara lain dilakukan oleh:

1. Chaney, Faccio, dan Parsley (2010) menemukan bahwa kualitas *earnings* yang rendah berasosiasi dengan *cost of debt* yang lebih tinggi hanya pada perusahaan yang tidak memiliki *political tie*. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki *political tie* menghadapi lebih sedikit konsekuensi negatif (misal: memperoleh jumlah kredit yang lebih kecil) akibat kualitas pengungkapan yang rendah.
2. Fisman (2001) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan mantan Presiden Soeharto kehilangan lebih banyak *return* pada masa rumor kesehatannya memburuk dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Fisman berpendapat bahwa hubungan politik merupakan faktor utama penentu profitabilitas pada negara-negara di Asia Tenggara. Hal inilah yang menjadi penyebab krisis di Asia Tenggara tahun 1997.
3. Penelitian Faccio (2010), yang melakukan analisis *cross country* (termasuk Indonesia) mengenai perusahaan yang memiliki *political tie*, menemukan bahwa *leverage* dan *market share* lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah. Namun kinerjanya lebih buruk dibanding perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik dengan pemerintah.
4. Penelitian Leuz dan Oberholzer-Gee (2003) mengenai Indonesia, menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *political tie* dengan Mantan Presiden Soeharto kemungkinan lebih kecil untuk mengakses pendanaan global karena bank pemerintah menyediakan modal dengan *cost* yang rendah. Selain itu pendanaan global memerlukan pengungkapan yang lebih luas dan pengawasan tambahan pada perusahaan, dan hal ini tidak menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki *political tie*.

Bank pemerintah yang seharusnya menjadi *role model* bagi bank swasta, ternyata banyak digunakan sebagai kendaraan politik pemerintah. Penelitian Laporta *et al.* (2002) dan Kane (1977) yang diambil dari Wijaya (2010), menemukan bahwa bank pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik pemerintah daripada pertimbangan bisnis secara ekonomi. Bahkan penelitian Backam (2001) dari Leuz & Oberholzer-Gee (2003), menyatakan bahwa perusahaan Indonesia yang memiliki hubungan politik dengan rezim mantan presiden Soeharto memiliki akses pendanaan yang menguntungkan, terutama dari bank pemerintah.

Secara umum penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *non-earnings information* (rasio

financial leverage), *earnings information* (rasio profitabilitas), dan jenis bank terhadap keputusan pemberian kredit bank. Penelitian ini juga menguji pengaruh *non-earnings information* (rasio *financial leverage*), *earnings information* (rasio profitabilitas), dan jenis bank terhadap keputusan pemberian kredit bank dengan *political tie* sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi keuangan mengenai *positive accounting theory*, khususnya kualitas *earnings*. Peningkatan kualitas *earnings* dalam laporan keuangan diharapkan mampu mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan perbankan. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi pengawasan perbankan nasional, terutama dalam pemberian kredit, sehingga modal tidak hanya dikuasai golongan tertentu saja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan bagi penelitian mengenai preferensi kredit bank di Indonesia yang jumlahnya masih sangat sedikit.

Analisis Kredit

Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah perusahaan memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib sesuai dengan kesepakatan bank (Rivai dan Veithzal 2006). Menurut Rivai dan Veithzal (2006), terdapat 6 prinsip dalam analisis kredit (6 C's analysis), yaitu: *character*, *capital*, *capacity*, *collateral*, *condition of economy*, dan *constraint*.

Menurut Rivai dan Veithzal (2006), aspek-aspek analisis kredit dan perhitungan kredit meliputi: aspek yuridis, pemasaran, manajemen dan organisasi, teknis, keuangan, jaminan, sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan analisis risiko. Dalam aspek pemasaran salah satu faktor yang dinilai analisis kredit adalah kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan, termasuk *political power* yang digunakan untuk menopang pemasarannya, apakah kebijakan dan strategi pemasaran cukup andal untuk merebut pangsa pasar. Dalam aspek keuangan, analisis kredit menggunakan analisis rasio untuk pengambilan keputusan, dalam hubungannya dengan penelitian keadaan keuangan perusahaan. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) *Debt to tangible net worth* (rasio *financial leverage*) dan (2) *Net profit margin*.

Pengaruh *Non-earnings Information* dan *Earnings Information* terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank

Prinsip 6C analisis kredit menempatkan faktor *capital* (*non-earnings information*) dan *capacity* (*earnings information*) sebagai 2 faktor terpenting setelah *character*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Zmijewski, yang diambil dari Palepu *et al.* (2004), menjelaskan bahwa faktor yang paling berguna dalam memprediksi kebangkrutan untuk satu tahun kedepan adalah *profitabilitas* dan *volatility* (*earnings information*) dan *financial leverage* (*non-earnings information*). *Earnings* berbasis nilai historis memiliki kelemahan utama yaitu diijinkannya pemilihan berbagai metode akuntansi oleh standar akuntansi. Hal ini memberikan insentif bagi perusahaan untuk terlibat dalam manajemen laba.

Tujuan perusahaan melakukan manajemen laba antara lain untuk memperoleh kredit dalam jumlah besar, dengan cara memberikan informasi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik. Hal ini mengakibatkan *earnings* menjadi bias optimistik karena muatan manajemen laba yang berlebihan. *Mandatory disclosure* yang rendah (Leuz dan Oberholzer-Gee 2003) dan praktek akuntansi serta auditing di Indonesia yang buruk, tidak mampu menghambat manajemen laba di Indonesia. Hal ini menyebabkan asimetri informasi antara perusahaan dan bank di Indonesia semakin besar.

Studi teoritik dan empiris di atas mendukung dugaan bahwa analisis kredit di Indonesia lebih mempertimbangkan *non-earnings information* dibanding *earnings information*, sehingga *level of assurance* dan reputasi kantor akuntan publik tidak dipertimbangkan. Tjondro (2007) menemukan bahwa *level of assurance* dan reputasi kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap keputusan kredit bank.

Pengaruh *Hard Information* dan *Soft Information* terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank

Menurut Foster (1986), rendahnya kualitas *earnings* menyebabkan analisis kredit mencari sumber informasi lain sebagai kompensasi perbedaan metode akuntansi dan terkandungnya manajemen laba dalam laporan laba rugi perusahaan (*hard information*). Salah satu sumber informasi lain yang dipertimbangkan adalah *soft information*, yaitu hubungan politik dengan pemerintah yang dimiliki perusahaan.

Pendapat lain yang mendukung teori ini adalah Tjondro (2007) menemukan bahwa *level of assurance* dan reputasi kantor akuntan publik

tidak berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank (jumlah kredit dan tingkat bunga kredit) di Indonesia. Hal ini memberikan indikasi bahwa analis kredit tidak berpersepsi bahwa laporan keuangan *audited* memiliki kualitas *earnings* yang lebih baik dibanding laporan keuangan yang tidak diaudit. Analis kredit lebih mempertimbangkan *soft information*, seperti *political tie*, sebagai sumber informasi profitabilitas perusahaan.

***Political Tie* Mempengaruhi Penilaian *Financial Leverage* dan Profitabilitas dalam Keputusan Pemberian Kredit Bank**

Informasi mengenai hubungan politik dengan pemerintah yang dimiliki perusahaan dipertimbangkan oleh analis kredit sebagai *earnings information* karena rendahnya kualitas *earnings* dalam laporan laba rugi perusahaan. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa hubungan politik dengan pemerintah dinilai sebagai *reputation of profitability*. Berdasarkan argumen tersebut, maka hubungan politik dengan pemerintah memperlemah penilaian profitabilitas dalam keputusan pemberian kredit bank.

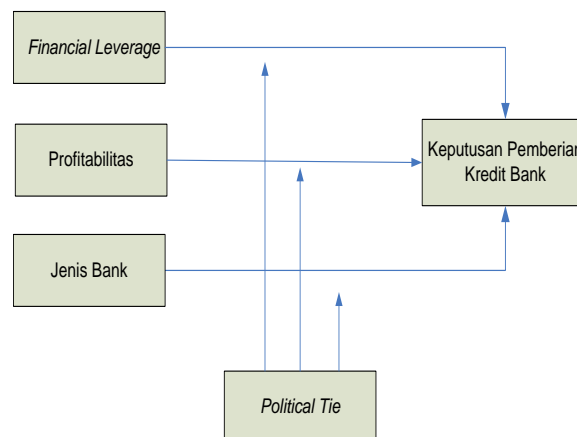
Pandangan kedua menyatakan bahwa hubungan politik dengan pemerintah sering diasumsikan mampu mengalihkan pinjaman bank bagi perusahaan tanpa mempertimbangkan apakah perusahaan memiliki proyek yang menguntungkan atau tidak, disebut *rent-seeking hypothesis* (Zheng dan Zhu 2009). Penelitian Chaney, Faccio, dan Parsley (2010) menemukan bahwa kualitas *earnings* yang rendah berasosiasi dengan *cost of debt* yang lebih tinggi hanya pada perusahaan yang tidak memiliki hubungan politik. Berdasarkan argumen tersebut, maka *political tie* dapat memperlemah penilaian *financial leverage* dalam keputusan pemberian kredit bank.

***Political Tie* Memiliki Pengaruh Lebih Besar di Bank Pemerintah Dibanding Bank Swasta**

Berdasarkan hasil kajian akademis, bank pemerintah lebih tidak efisien dibanding bank swasta, dan lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik pemerintah. Misal penelitian Bonin *et al.* (2004) menyatakan bahwa bank pemerintah lebih tidak efisien dibanding bank swasta. Hal senada diungkapkan Yeyati *et al.* (2004). Laporta *et al.* (2002) dan Kane (1977) bahkan menyatakan bahwa bank pemerintah lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik. Berdasarkan penelitian terhadap bank pemerintah di Indonesia, ditemukan bahwa perusahaan Indonesia yang memiliki hubungan

politik dengan rezim Soeharto memiliki akses pendanaan yang menguntungkan, terutama dari bank pemerintah (Backman 2001).

Kerangka Konseptual



Hipotesis

Prinsip 6C analisis kredit menempatkan faktor *capital* (*non-earnings information*) dan *capacity* (*earnings information*) sebagai 2 faktor terpenting setelah *character*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Zmijewski, yang diambil dari Palepu *et al.* (2004), menjelaskan bahwa faktor yang paling berguna dalam memprediksi kebangkrutan untuk satu tahun kedepan adalah *profitabilitas* dan *volatility* (*earnings information*) dan *financial leverage* (*non-earnings information*). Studi teoritik dan beberapa penelitian empiris mendukung dugaan bahwa analis kredit di Indonesia lebih mempertimbangkan *non-earnings information* dibanding *earnings information* karena *earnings* berbasis nilai historis memiliki kelemahan utama yaitu diijinkannya pemilihan berbagai metode akuntansi oleh standar akuntansi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ke-1 adalah:

H1: *Non-earnings information* (rasio *financial leverage*) berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank.

Kondisi Indonesia yang memiliki regulasi institusional yang lemah, merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki *political tie*. Kondisi asimetri informasi yang tinggi turut meningkatkan nilai dari *political tie*. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Faccio (2010) yang melakukan analisis *cross-country*, termasuk Indonesia, menemukan bahwa *leverage* dan *market share* lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ke-2 adalah:

H2: *Non-earnings information* (rasio *financial leverage*) berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank dengan *political tie* sebagai variabel moderasi.

Zmijewski, yang diambil dari Palepu *et al* (2004), menjelaskan bahwa faktor yang paling berguna dalam memprediksi kebangkrutan untuk satu tahun kedepan adalah *profitabilitas* dan *volatility (earnings information)* dan *financial leverage (non-earnings information)*. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sehingga perusahaan mampu membayar kembali kredit bank yang diperolehnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ke-3 adalah:

H3: *Earnings information* (rasio profitabilitas) berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank.

Tujuan perusahaan melakukan manajemen laba antara lain untuk memperoleh kredit dalam jumlah besar, dengan cara memberikan informasi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik. Hal ini mengakibatkan *earnings* menjadi bias optimistik karena muatan manajemen laba yang berlebihan. *Mandatory disclosure* yang rendah (Leuz dan Oberholzer-gee 2003) dan praktek akuntansi serta auditing di Indonesia yang buruk, tidak mampu menghambat manajemen laba di Indonesia.

Menurut hasil observasi Tim Bank Dunia terhadap praktek akuntansi dan auditing di Indonesia (www.bapepam.go.id), ditemukan bahwa profesi audit di Indonesia tidak memiliki sistem pengawasan publik yang independen untuk mengawasi kualitas pengendalian internal KAP, kualitas *assurance*, serta penyelidikan dan pemberian sanksi disiplin bagi anggota profesi yang melanggar.

Menurut Foster (1986), rendahnya kualitas *earnings* menyebabkan analis kredit mencari sumber informasi lain sebagai kompensasi perbedaan metode akuntansi dan terkandungnya manajemen laba dalam laporan laba rugi perusahaan (*hard information*). Salah satu sumber informasi lain yang dipertimbangkan adalah *soft information*, yaitu hubungan politik dengan pemerintah yang dimiliki perusahaan. Menurut Rivai dan Veithzal (2006), analis kredit juga menilai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan, antara lain: *political power* yang digunakan untuk menopang pemasarannya, apakah kebijakan dan strategi pemasaran cukup andal untuk merebut pangsa pasar.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ke-4 adalah:

H4: *Earnings information* (rasio profitabilitas) berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank dengan *political tie* sebagai variabel moderasi.

Bank pemerintah lebih mengutamakan kepentingan politik pemerintah daripada pertimbangan bisnis secara ekonomi (Kane 1977 yang diambil dari Wijaya 2010). Hal ini juga didukung oleh penelitian Laporta *et al.* (2002) yang menemukan bahwa bank pemerintah berasosiasi dengan lambatnya perkembangan keuangan dan pertumbuhan produktivitas yang lebih rendah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ke-5 adalah:

H5: Jenis bank berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank.

Beberapa penelitian mengenai preferensi kredit menemukan bahwa *political tie* memiliki pengaruh yang lebih besar di bank pemerintah dibanding bank swasta, seperti yang dilakukan oleh:

- Khawaja dan Mian (2004) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki *political tie* memperoleh kredit dua kali lebih besar dan memiliki potensi *default* 50% lebih besar dibanding perusahaan yang tidak memiliki *political tie*. Preferensi tersebut terjadi pada bank pemerintah, namun tidak terjadi pada bank swasta.
- Leuz dan Oberholzer-Gee (2003), dimana perusahaan yang memiliki *political tie* dengan Mantan Presiden Soeharto kemungkinan lebih kecil untuk mengakses pendanaan global karena bank pemerintah menyediakan modal dengan *cost* yang rendah.
- Backman (2001), dimana perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan rezim Soeharto memiliki akses pendanaan yang menguntungkan, terutama dari bank pemerintah.

Hal ini memberikan indikasi bahwa *political tie* lebih dipertimbangkan di bank pemerintah dibanding bank swasta. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis penelitian ke-6 adalah:

H6: Jenis bank berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit bank dengan *political tie* sebagai variabel moderasi.

Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan referensi dari penelitian

Sharma, Durand, Gur-Arie (1981). Penelitian ini menggunakan 3 model analisis, yaitu:

Model ke-1

$$DEBT_t = \alpha + \beta_1 DTN_{t-1} + \beta_2 NPM_{t-1} + \beta_4 JENISBANK_t + \beta_5 TANGIBILITAS_{t-1} + \beta_6 UKURAN PERUSAHAAN_{t-1} + \beta_7 UKURANBANK_t + \beta_8 RELATION LENDING_{t-1} + \beta_9 TAHUN_t + \beta_{10} INDUSTRI_t + \varepsilon$$

Model ke-2

$$DEBT_t = \alpha + \beta_1 DTN_{t-1} + \beta_2 NPM_{t-1} + \beta_3 POLITICAL TIE_t + \beta_4 JENISBANK_t + \beta_5 TANGIBILITAS_{t-1} + \beta_6 UKURANPERUSAHAAN_{t-1} + \beta_7 UKURANBANK_t + \beta_8 RELATION LENDING_{t-1} + \beta_9 TAHUN_t + \beta_{10} INDUSTRI_t + \varepsilon$$

Model ke-3

$$DEBT_t = \alpha + \beta_1 DTN_{t-1} + \beta_2 NPM_{t-1} + \beta_3 POLITICAL TIE_t + \beta_4 JENISBANK_t + \beta_5 TANGIBILITAS_{t-1} + \beta_6 UKURANPERUSAHAAN_{t-1} + \beta_7 UKURANBANK_t + \beta_8 RELATION LENDING_{t-1} + \beta_9 TAHUN_t + \beta_{10} INDUSTRI_t + \beta_{11} POLITICALTIE * DTN_{t-1} + \beta_{12} POLITICALTIE * NPM_{t-1} + \beta_{13} POLITICALTIE * JENISBANK_t + \beta_{14} POLITICALTIE * TANGIBILITAS_{t-1} + \beta_{15} POLITICALTIE * UKURAN PERUSAHAAN_{t-1} + \beta_{16} POLITICALTIE * UKURANBANK_t + \beta_{17} POLITICALTIE * RELATIONLENDING_{t-1} + \beta_{18} POLITICAL TIE * TAHUN_t + \beta_{19} POLITICALTIE * INDUSTRI_t + \varepsilon$$

METODE PENELITIAN

Periode yang diteliti adalah periode setelah jatuhnya rezim Soeharto atau era reformasi. Periode yang diteliti adalah tahun 2005 sampai tahun 2010. Tahun 2005 dimulainya era reformasi, di mana presiden pertama kalinya dipilih oleh rakyat melalui pemilu tahun 2004.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 423 perusahaan *go public* (data per 8 April 2011) yang diambil dari www.idx.co.id. Sampel penelitian ini adalah 309 perusahaan. Dalam menentukan jumlah sampel terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu:

- Perusahaan bukanlah lembaga keuangan atau pembiayaan.
- Perusahaan memiliki minimal 3 tahun data laporan keuangan yang dipublikasikan.

Tabel 1 berikut ini menjelaskan rincian sampel perusahaan dan jumlah observasi yang diuji dalam penelitian ini.

Tabel 1. Rincian Sampel Perusahaan dan Jumlah Observasi

Keterangan	Jumlah
Total perusahaan yang menjadi populasi penelitian	423 perusahaan
Dikurangi:	
- Perusahaan yang termasuk dalam lembaga keuangan dan pembiayaan	77
- Perusahaan yang listing di BEI setelah tahun 2008	35
- Perusahaan yang de-listing di pertengahan tahun 2010	2
Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian	309 perusahaan
Total seluruh pemberian utang bank untuk 309 perusahaan	1813 data
Dikurangi:	
- Utang bank yang diberikan bank asing di luar negeri	142
- Utang bank dalam bentuk sindikasi (gabungan 2 atau lebih bank)	35
- <i>Debt-to-tangible net worth</i> (DTN) negatif	59
- Data variabel independen yang tidak lengkap (data salah satu variabel independen tidak lengkap, maka data langsung dikeluarkan dari pengujian)	112
Total pemberian utang bank yang diuji	1465 data

Sumber: Olahan (2011)

Penjelasan lebih detail terkait Tabel 2 adalah:

a. *Political tie*

Proksi *political tie* ada 2, yaitu:

- Menurut Peraturan Bank Indonesia No 12/3/PBI/2010 memberikan contoh nasabah yang tergolong *politically exposed person*, yaitu: (1) presiden, (2) pejabat setingkat menteri, (3) gubernur, (4) direktur perusahaan BUMN, (5) ketua dan eksekutif partai politik, (6) pejabat senior TNI atau polisi, (7) pejabat senior di mahkamah dan jaksa agung, (8) pejabat yang ditunjuk dengan peraturan presiden, (9) anggota keluarga (istri/suami, orang tua, saudara kandung, anak, menantu, dan cucu) dari pejabat yang telah disebutkan di atas.
- Perusahaan penerima kredit adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Data mengenai *political tie* diperoleh dari www.reuters.com; www.tokohindonesia.com, dan situs-situs berita internet.

Proksi keputusan pemberian kredit bank pada Tabel 3 adalah:

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Independen

Variabel Independen			
Variabel	Deskripsi	Proksi	Skala
Political tie	Keterkaitan perusahaan dengan seseorang yang memegang jabatan di pemerintahan	Dummy variable, 1 = memilih political tie; 0 = tidak memiliki political tie	Nomonal
Financial leverage	Jumlah dana dari luar perusahaan dibandingkan model perusahaan	Debt-to-tangible net worth ratio = total liabilities / (Total equities – intangible assets)	Rasio
Profitabilitas	Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit	Net profit margin ratio = Net Income / Net Sales	Rasio
Jenis bank	Jenis bank yang memberikan kredit	Dummy variable, 1 = bank pemerintah; 0 = bank swasta	Nominal

Sumber: Olahan (2012)

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Dependen

Variabel Dependen			
Variabel	Deskripsi	Proksi	Skala
Keputusan pemberian kredit bank	Jumlah kredit baru yang diberikan oleh bank pada periode t.	Ln Pagu maksimal utang bank _t	Rasio

Sumber: Olahan (2011)

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel Kontrol

Variabel Kontrol			
Variabel	Deskripsi	Proksi	Skala
Tangibilitas	Perbandingan aktiva tetap terhadap total asset yang dimiliki perusahaan	Tangibilitas = Net fixed assts / total asset	Rasio
Ukuran Perusahaan	Total kekayaan yang dimiliki perusahaan pada periode t-1	Ln total aseta pada perode t-1	Rasio
Ukuran Bank	Total Kekayaan yang dimiliki bank pada periode t	Ln total asset bank pada periode t	Rasio
Relation lending	Preferensi kredit yang diperoleh perusahaan karena history kredit pada periode sebelumnya sangat baik.	Dummy variable, 1 = perusahaan pernah memperoleh kredit dari bank yang sama pada periode t-1; 0 = tidak pernah	Nominal
Tahun	Tahun dimana kredit diberikan	Dummy variable, 1 = Tahun krisis; 0 = Tahun non-krisis	Nominal
Industry	Jenis industry yang memperoleh kredit	Dummy variable, 1 = Agriculture; 2 = Mining; 3 = Basic; 4 = Miscellaneous; 5 = Consumer Goods; 6 = Property; 7 = Infrastructure; 8 = Trade & Services	Nominal

Sumber: Olahan (2011)

- 1) Jenis kredit yang dianalisis adalah kredit investasi dan kredit modal kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- 2) Jumlah kredit adalah pagu maksimal kredit baru yang disetujui bank. Kredit baru adalah pengajuan proposal kredit pertama kali oleh calon debitur (perusahaan). Kredit baru tidak dimiliki oleh perusahaan pada tahun sebelumnya.
- 3) Kredit baru, tidak termasuk perpanjangan kredit yang tidak mengalami kenaikan pagu kredit.
- 4) Kredit baru, termasuk perpanjangan kredit yang mengalami kenaikan pagu maksimal kredit.

Data kredit bank diperoleh dari laporan keuangan audited, yaitu *notes to financial statement* bagian utang bank jangka pendek dan

jangka panjang. Penjelasan lebih detail terkait Tabel 4 adalah:

a. Tahun

Data tahun pemberian kredit diperoleh dari rekap utang bank selama tahun 2005 – 2010. Tahun pemberian kredit dibagi menjadi 2:

1. Tahun krisis: tahun dimana tingkat inflasi dan tingkat bunga bank menunjukkan kenaikan yang signifikan, yaitu: tahun 2006 dan 2008. Tingkat inflasi dan tingkat bunga bank dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6.
2. Tahun non-krisis: selain tahun krisis.

b. Industri

Industri dibagi menjadi 8 kelompok berdasarkan laporan statistik rasio keuangan perusahaan go publik yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 309 perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011. Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 6, jumlah observasi yang paling banyak diuji dalam penelitian adalah tahun 2008 dan jenis industri yang paling banyak menerima pemberian kredit adalah perusahaan dagang dan jasa.

Tabel 5. Jumlah Observasi berdasarkan Tahun Pemberian Kredit

Tahun Pemberian Utang Bank	Jumlah Data	
Tahun 2005	115	Observasi
Tahun 2006	155	
Tahun 2007	274	
Tahun 2008	358	
Tahun 2009	280	
Tahun 2010	283	
Total	1465	Observasi

Sumber: Olahan (2011)

Tabel 6. Jumlah Observasi berdasarkan Jenis Industri

Jenis Industri	Jumlah Data	
1 = Agriculture	62	observasi
2 = Mining	100	
3 = Basic industry & chemicals	282	
4 = Miscellaneous industry	167	
5 = Consumer goods industry	127	
6 = Property, real estate, building construction	209	
7 = Infrastructure, utilities, and transportations	166	
8 = Trade & services	352	
Total	1465	observasi

Sumber: Olahan (2011)

Berdasarkan Tabel 7 berikut, rata-rata utang bank yang diberikan adalah Rp 52,6 miliar dengan jumlah minimum sebesar Rp 70,6 juta dan maksimum sebesar Rp 9,06 triliun. Rata-rata DTN perusahaan yang diteliti sebesar 4.32 dengan jumlah minimum dan maximum sebesar 0.00 dan 322.27. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang diteliti rata-rata memiliki jumlah utang 4 kali

lebih besar dibanding modalnya. Dari sisi NPM, rata-rata perusahaan yang diteliti memiliki rasio 7% dari total penjualan. Ukuran perusahaan yang diteliti mulai dari yang memiliki total aset Rp 9,1 miliar sampai dengan total aset mencapai Rp 97,56 triliun, dengan rata-rata total aset Rp 1,4 triliun. Ukuran bank yang diteliti mulai total aset Rp 413 miliar) sampai dengan total aset Rp408 triliun, dengan rata-rata ukuran bank Rp. 48,7 triliun.

Moderated Regression Analysis (MRA) dimulai dengan menentukan apakah *political tie* merupakan variabel moderator, *pure moderator* atau *quasi moderator*, menggunakan prosedur *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Kriteria penentuan dapat dilihat pada Gambar 5. Menurut Sharma, Durand, dan Gur-Arie (1981), kriteria penentuan adalah:

- Jika model ke-2 dan model ke-3 berbeda signifikan, dan *political tie* berinteraksi signifikan dengan *predictor variable*, maka *political tie* adalah variabel moderator.
- Jika model ke-1 dan model ke-2 tidak berbeda signifikan, tetapi keduanya berbeda dengan model ke-3, dan *political tie* tidak berinteraksi signifikan dengan *criterion variable*, maka *political tie* adalah *pure moderator variable*.
- Jika model ke-1, model ke-2, dan model ke-3 berbeda satu dengan lainnya, dan *political tie* berinteraksi signifikan dengan *criterion variable*, maka *political tie* adalah *quasi moderator variable*.

Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis (MRA)* menunjukkan bahwa:

- Dari hasil pengujian regresi model ke-1, 2, dan 3, diperoleh bahwa *political tie* adalah *pure moderator variable*.
- Berdasarkan tabel *coefficients*, NPM, ukuran perusahaan, ukuran bank, Industri_3, Industri_7, P*NPM, P*Industri_2, P*Industri_3, dan P*Industri_7 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit bank. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi variabel-variabel tersebut kurang dari 0.10.

Tabel 7. Hasil Statistik Deskriptif dan Transformasi Data

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
UTANG BANK	1,465	70,560,000	9,058,872,100,001	52,619,366,292	1.789*
DTN	1,465	0.00	322.27	4.32	23.02
NPM	1,465	-10.29	2.04	0.07	0.46
TANGIBILITAS	1,465	0.00	0.98	0.34	0.22
UKURAN PERUSAHAAN	1,465	9,094	97,559,606	1,441,384	1.636**
UKURAN BANK	1,465	413,540	408,771,732	48,720,024	1.426**
Valid N (listwise)	1,465				

Keterangan: *dalam Rupiah ** dalam juta Rupiah
Sumber: Olahan (2011)

Hasil pengujian menunjukkan *non-earnings information* (rasio *financial leverage*) tidak berpengaruh terhadap utang bank., artinya H_0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $(0.225) > 0.05$. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Zmijewski, yang diambil dari Palepu *et al* (2004), yang menjelaskan bahwa faktor yang paling berguna dalam memprediksi *financial distress* untuk satu tahun kedepan adalah *financial leverage* dan profitabilitas.

Alasan yang mungkin adalah analis kredit memiliki pandangan yang berbeda mengenai *financial leverage* suatu perusahaan (Estenson, 1996). Estenson mengemukakan analisis *financial leverage* dari sudut pandang:

1. *Cost of capital*

Cost of capital tidak hanya terdiri dari deviden, tetapi juga *opportunity cost*. *Opportunity cost* adalah alternatif dalam penggunaan modal, misal: pembelian mesin, tanah, investasi di perusahaan lain, dan sebagainya. Jadi ketika kita mengevaluasi *financial leverage*, faktor utamanya adalah kemampuan menghasilkan arus kas, baik untuk melunasi utang maupun untuk memenuhi *opportunity cost* yang paling rendah. Selama *Return On Asset* (ROA) lebih besar dari *cost of debt*, dan tingkat *financial leverage* masih dalam batas wajar, maka semakin besar utang, semakin besar *Return on Equity* (ROE). Palepu, Healy, dan Bernard (2004), menyatakan bahwa ROE dipengaruhi oleh 2 hal:

- Kemampuan perusahaan mengelola asset-nya untuk menghasilkan profit, dan
- Persentase total aset terhadap *shareholders equity*.

2. Siklus bisnis

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah volatilitas siklus bisnis. Industri yang cenderung lebih stabil, seperti: *infrastructure* (*public utilities*), *consumer goods* dan *basic industry*, umumnya menikmati laba dan pertumbuhan yang stabil, sehingga memungkinkan bagi industri ini untuk memiliki *leverage* yang lebih besar dibanding industri lainnya.

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P^*DTN juga tidak berpengaruh terhadap utang bank, artinya H_0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $(0.482) > 0.05$. Alasan yang mungkin adalah *political tie* tidak dipertimbangkan dalam penilaian *financial leverage*. Rivai dan Veithzal (2006) menjelaskan bahwa analis kredit menilai kekuatan *political tie* perusahaan dalam menopang strategi pemasaran perusahaan (*reputation of profitability*). Jadi

political tie tidak ada keterkaitan dengan penilaian *financial leverage*.

Hasil pengujian menunjukkan rasio profitabilitas (NPM) berpengaruh negatif terhadap utang bank, artinya H_0 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas 0.06 (signifikan pada 10%). Alasan yang mungkin adalah pengajuan jumlah kredit bank tergantung dari *demand* perusahaan (debitur). Pada perusahaan dengan *net profit margin* tinggi, perusahaan lebih mengutamakan sumber pendanaan internal, yaitu: *retained earnings*. Selain itu perusahaan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendanaan dari penerbitan saham dan obligasi. Logikanya semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin rendah ketergantungan perusahaan pada utang bank. Beberapa penelitian yang mendukung antara lain:

a. Penelitian ICRA Indonesia (2011)

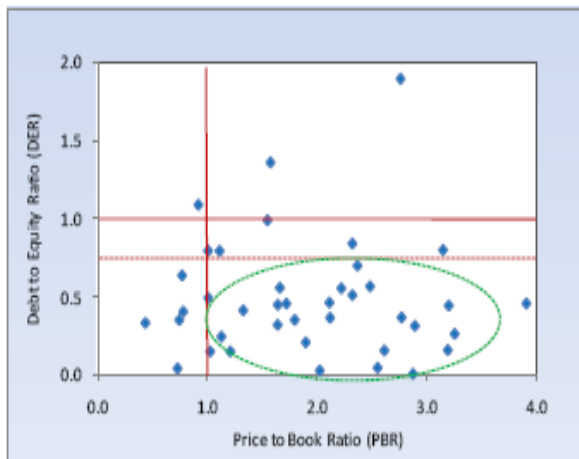


Sumber: ICRA Indonesia (2011)

Gambar 1. Undisbursed loan-to-Total Loan Extended

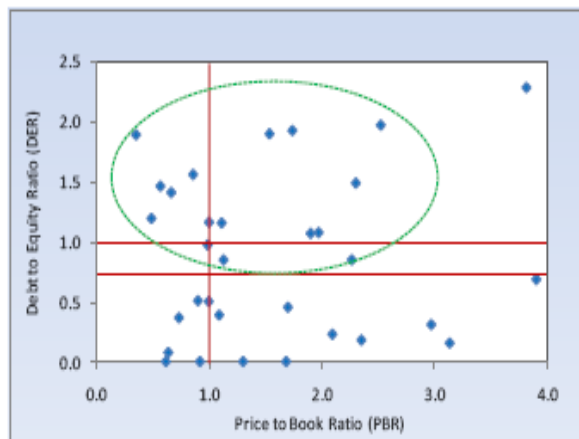
Dari gambar 1, pada tahun krisis (2006 dan 2008) justru rasio *undisbursed loan* terhadap total kredit menunjukkan angka yang paling kecil (21% dan 19%) dibanding tahun non-krisis. Menurut ICRA Indonesia (2011), pada tahun non-krisis pasar utang dan ekuitas sama-sama menguntungkan, sehingga perusahaan memiliki opsi lain untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, dengan kata lain perusahaan mengurangi *demand* terhadap permintaan kredit bank. Hal ini dapat dilihat dari data saham IPO dan *right issue* di tahun 2009 (Rp 13 triliun) dan 2010 (Rp 73,5 triliun), sedangkan penerbitan obligasi perusahaan di tahun 2009 (Rp 27,2 triliun) dan 2010 (Rp36,6 triliun) (ICRA Indonesia, 2011).

- Penelitian Prastowo dan Chawwa (2009) menemukan bahwa karakteristik perusahaan yang melakukan IPO, *right issue*, dan menerbitkan obligasi ternyata berbeda.



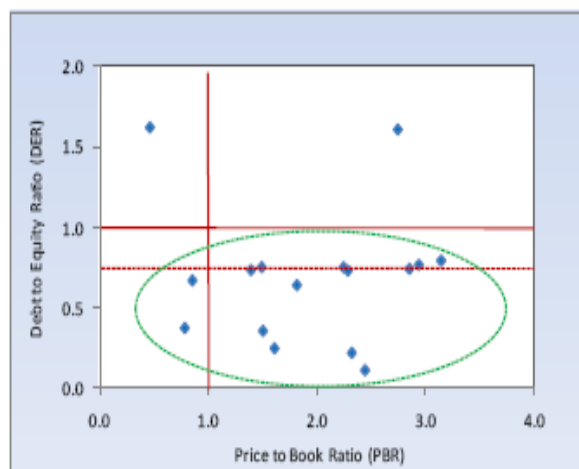
Sumber: Prastowo dan Chawwa (2009)

Gambar 2. PBR dan DER Perusahaan yang Melakukan IPO, 2005-2008



Sumber: Prastowo dan Chawwa (2009)

Gambar 3. PBR dan DER Perusahaan yang Melakukan *Right Issue*, 2005-2008



Sumber: Prastowo dan Chawwa (2009)

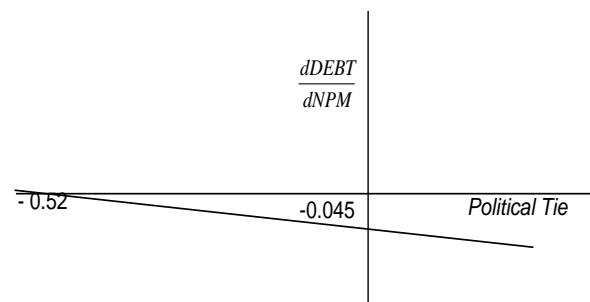
Gambar 4. PBR dan DER Perusahaan yang Menerbitkan Obligasi, 2005-2008

Dari Gambar 2 dan 3, dapat dilihat bahwa perusahaan yang melakukan IPO cenderung memiliki *debt-equity ratio* (DER) yang rendah, sedangkan perusahaan yang melakukan *right issue* cenderung memiliki DER yang tinggi. Perusahaan yang menerbitkan obligasi cenderung memiliki DER yang rendah (Gambar 4). Dari ketiga gambar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila perusahaan besar membutuhkan pendanaan dalam jumlah besar, prioritas mereka adalah (1) melakukan IPO atau menerbitkan surat utang, (2) meminjam dari bank, (3) melakukan *right issue*.

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P^*NPM juga berpengaruh negatif terhadap utang bank, artinya H_0 ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas 0.007 (signifikan pada 1%). Pada hasil pengujian interaksi (P^*NPM) menunjukkan pengaruh negatif yang lebih kuat dibanding pengujian secara independen. Hal ini dapat dilihat pada angka beta (absolut) pada Tabel 8.

Berdasarkan Tabel 8, nilai beta (absolut) P^*NPM (0.087) > beta (0.045), artinya perusahaan dengan NPM rendah memperoleh kredit bank yang lebih besar apabila memiliki *political tie*. Hal ini berarti *rent-seeking hypothesis* (Zheng dan Zhu 2009) terbukti. Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh rasio profitabilitas terhadap keputusan pemberian kredit, maka dilakukan pengujian *partial derivative*.

Berdasarkan Gambar 5, dapat diartikan bahwa adanya *political tie* akan memperkuat (negatif) pengaruh profitabilitas terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain perusahaan dengan profitabilitas yang rendah dan memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih besar.



Sumber: Olahan (2012)

Gambar 5. Interaksi antara NPM dan *Political Tie*

Penyebabnya adalah kondisi Indonesia yang memiliki regulasi institusional yang lemah, merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki *political tie*. Kondisi asimetri informasi yang tinggi turut meningkatkan nilai

Tabel 8. Hasil Pengujian Regresi NPM terhadap Keputusan Pemberian Kredit Bank secara Independen dan Interaksi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)					
NPM	-0.175	0.093	-0.045	-1.885	0.060
P*NPM	-1.216	0.453	-0.087	-2.688	0.007

Sumber: olahan (2011)

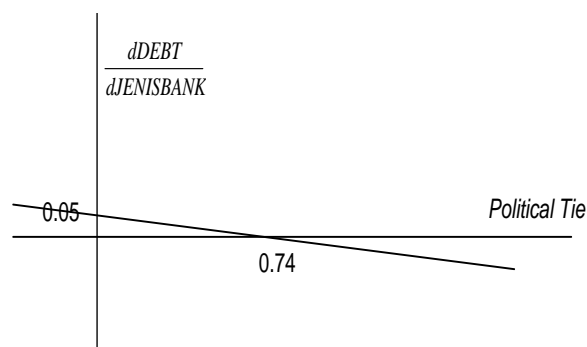
Tabel 9. Regresi Interaksi Jenis Bank dan *Political Tie*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.406				
POLITICALTIE	-1.322	1.458	-0.361	-0.907	0.365
JENISBANK	0.214	0.15	0.05	1.426	0.154
P*JENISBANK	-0.399	0.228	-0.068	-1.748	0.081

Sumber: Olahan (2012)

dari *political tie* yang dimiliki perusahaan. Hasil ini didukung oleh penelitian Faccio (2010) yang melakukan analisis *cross-country*, termasuk Indonesia, menemukan bahwa *leverage* dan *market share* lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki *political tie*. Ternyata kondisi seperti pada rezim Soeharto (Fisman 2001 dan Backman 2001) belum berubah sepenuhnya pada jaman reformasi seperti sekarang ini.

Hasil pengujian menunjukkan jenis bank tidak berpengaruh terhadap utang bank, artinya H_0 gagal ditolak. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas ($0.154 > 0.05$). Alasan yang mungkin adalah bank pemerintah menunjukkan kinerja yang makin baik dan efisien. Selain itu bank pemerintah juga lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Hal ini ditunjukkan dengan masuknya 3 bank pemerintah (Mandiri, BRI, dan BNI) dalam 2000 peringkat perusahaan terbesar dan terbaik versi Forbes Global di tahun 2011 (10 peringkat perusahaan terbesar di Indonesia).



Sumber: Olahan (2012)

Gambar 6. Interaksi antara Jenis Bank dan *Political Tie*

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*jenis bank berpengaruh negatif terhadap kredit bank, artinya *political tie* yang dimiliki perusahaan pengaruhnya lebih besar di bank swasta dibanding bank pemerintah. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas (0.081) signifikan pada 10%. Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh jenis bank terhadap keputusan pemberian kredit, maka dilakukan pengujian *partial derivative*. Tahap pengujian *partial derivative* seperti pada Tabel 9.

Berdasarkan Gambar 6 dapat diartikan bahwa adanya *political tie* akan memperkuat (negatif) pengaruh jenis bank terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain perusahaan yang memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih besar di bank swasta dibanding bank pemerintah.

Alasan yang mungkin adalah:

- Bank pemerintah lebih efisien dan lebih berhati-hati (*prudent*) dalam memberikan kredit dibanding bank swasta. Hal ini didukung dengan masuknya 3 bank pemerintah (Mandiri, BRI, dan BNI) dalam 2000 peringkat perusahaan terbesar dan terbaik versi Forbes Global di tahun 2011 (10 peringkat perusahaan terbesar di Indonesia).
- Menurut Latif Adam (2012), pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), karakteristik perbankan Indonesia cenderung oligopolistik. Porsi nasabah yang memiliki tabungan lebih dari Rp 2 milyar hanya 7% dari total nasabah bank, dan menguasai tabungan di perbankan sekitar 45%. Nasabah ini sering memeras bank swasta untuk memberikan bunga yang tinggi (di atas tingkat bunga yang ditetapkan Lembaga Pen-

jamin Simpanan). Sebaliknya bank pemerintah cenderung lebih kebal terhadap “pemerasan” ini karena sumber dana diperoleh dari tabungan pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari ditunjuknya Bank BNI sebagai bank operasional 1 oleh kementerian keuangan dalam penyaluran dana-dana APBN (Megasari 2011). Selain itu jumlah bank swasta jauh lebih banyak dibanding bank pemerintah, sehingga persaingan antar bank swasta juga menjadi lebih tinggi.

Hasil pengujian menunjukkan tangibilitas tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $(0.506) > 0.05$. Beberapa alasan yang mungkin adalah

- a. Jaminan utama untuk jenis kredit investasi dan kredit modal kerja tidak hanya terbatas pada aset tetap, tetapi juga persediaan dan piutang dagang (Rivai dan Veithzal 2006).
- b. Penilaian aset untuk jaminan kredit umumnya dilakukan oleh *appraisal* dengan menggunakan *fair value*. PSAK 16 yang wajib diterapkan sejak tahun 2008 memberikan pilihan bagi perusahaan go publik untuk menerapkan *cost* atau *fair value*. Hal ini menyebabkan angka *net fixed asset* di neraca untuk setiap perusahaan memiliki dasar yang berbeda.

Dari kedua alasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tangibilitas tidak digunakan dalam keputusan pemberian kredit bank.

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*tangibilitas tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $(0.119) > 0.05$. Alasan yang mungkin adalah tangibilitas merupakan rasio aktiva tetap yang dimiliki perusahaan saat ini dibandingkan total seluruh aktiva, sedangkan analisis kredit memandang *political tie* sebagai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan (Rivai dan Veithzal 2006), sehingga sifatnya lebih pada penilaian prospek profitabilitas perusahaan di masa mendatang, tidak pada kondisi perusahaan saat ini. Jadi *political tie* tidak ada keterkaitan dengan penilaian tangibilitas perusahaan.

Hasil pengujian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap utang bank. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas $(0.000) < 0.05$. Alasan yang mungkin adalah ukuran perusahaan lebih sering digunakan sebagai proksi ukuran jaminan yang dimiliki perusahaan (Hamada 2008). Rivai dan Veithzal (2006), menyatakan bahwa jaminan perbankan merupakan suatu upaya untuk memperoleh pelunasan kredit yang diberikan kepada perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar aset

perusahaan yang dapat dijadikan jaminan untuk utang bank, sehingga resiko terjadinya gagal bayar juga lebih kecil.

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*ukuran bank tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas $(0.261) > 0.05$. Alasan yang mungkin adalah bank melihat ukuran perusahaan sebagai nilai jaminan yang dapat disediakan perusahaan saat ini dalam pengajuan kredit. Rivai dan Veithzal (2006), mengatakan umumnya bank mempunyai patokan bahwa nilai jaminan harus lebih tinggi dari jumlah kredit yang disetujui. Apabila dikemudian hari terjadi gagal bayar, maka pihak bank dapat menjual jaminan tersebut. Di sisi lain analisis kredit memandang *political tie* sebagai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan (Rivai dan Veithzal 2006), sehingga sifatnya lebih pada prospek profitabilitas perusahaan di masa mendatang.

Hasil pengujian menunjukkan ukuran bank berpengaruh positif terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $(0.000) < 0.05$. Menurut De Haas, Ferreira, dan Taci (2009), ukuran bank mempengaruhi jumlah kredit. Bank besar memperoleh keuntungan lebih dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan besar, karena keuntungan yang mereka peroleh melebihi biaya memproses informasi calon debitur (*economic scale*). Selain itu bank kecil terkendala aturan perbankan yang membatasi jumlah kredit kepada calon debitur, sehingga mereka lebih fokus pada perusahaan kecil dan menengah. Di Indonesia diatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang bertujuan agar pemberian kredit tidak terpusat pada peminjam atau kelompok tertentu (Rivai dan Veithzal 2006). Menurut Peraturan Bank Indonesia no 7/3/PBI/2005 pasal 11 menyatakan bahwa BMPK ditetapkan sebesar 20% - 25% dari modal bank.

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P*ukuran bank tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dilihat dari nilai probabilitas $(0.261) > 0.05$. *Political tie* tidak mempengaruhi penilaian analisis kredit terhadap ukuran bank, karena ketentuan BMPK merupakan suatu regulasi yang harus dipenuhi, apabila bank tidak ingin dikenakan sanksi dari Bank Indonesia. Batas BMPK adalah 20%-25% dari modal bank saat memberikan kredit (kondisi saat ini). Di sisi lain analisis kredit memandang *political tie* sebagai kebijakan dan strategi pemasaran perusahaan (Rivai dan Veithzal, 2006), sehingga sifatnya lebih pada prospek profitabilitas perusahaan di masa mendatang.

Hasil pengujian menunjukkan *relation lending* tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas $(0.907) > 0.05$.

Hal ini bertentangan dengan penelitian Hamada (2008) di Indonesia, bahwa bank lebih mengandalkan *relation lending* dalam memberikan kredit kepada perusahaan kecil dan menengah. Alasan yang mungkin adalah sebagai berikut:

- a. Dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan besar (go publik), bank tidak mengandalkan *relation lending* karena asimetri informasi pada perusahaan go publik tidak sebesar pada perusahaan kecil dan menengah.
- b. Bank mulai mengurangi penggunaan teknik *relation lending* dalam keputusan kredit. Hal ini sesuai dengan penelitian Hamada dan Konishi (2010) di Indonesia, yang menemukan bahwa setelah restrukturisasi perbankan, *related lending* berkurang.

Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P^* *relation lending* juga tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.489) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah *political tie* tidak dipertimbangkan dalam penilaian *relation lending*. Rivai dan Veithzal (2006) menjelaskan bahwa analisis kredit menilai kekuatan *political tie* perusahaan dalam menopang strategi pemasaran perusahaan. Jadi *political tie* tidak ada keterkaitan dengan penilaian *relation lending*.

Hasil pengujian menunjukkan tahun tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.769) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah karena pemberian kredit tergantung dari *demand* perusahaan. Justru pada tahun krisis (2006 dan 2008) rasio *undisbursed loan* terhadap total kredit lebih kecil dibanding tahun non-krisis. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun krisis perusahaan lebih banyak mengajukan kredit bank dibanding tahun non-krisis.

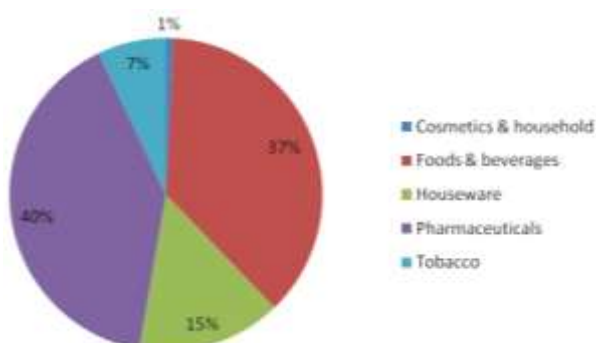
Hasil pengujian secara interaksi menunjukkan P^* tahun juga tidak berpengaruh terhadap utang bank. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (0.963) > 0.05. Alasan yang mungkin adalah *political tie* tidak dipertimbangkan dalam penilaian tahun pemberian kredit. Rivai dan Veithzal (2006) menjelaskan bahwa analisis kredit menilai kekuatan *political tie* perusahaan dalam menopang strategi pemasaran perusahaan. Jadi *political tie* tidak ada keterkaitan dengan penilaian tahun pemberian kredit.

Hasil pengujian menunjukkan jenis industri: *basic*, *miscellaneous*, *consumer goods*, dan *infrastructure industry* berpengaruh positif terhadap utang bank, artinya keempat industri ini memperoleh kredit bank yang lebih besar dibanding industri lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas industri tersebut < 0.05.

Alasan yang mungkin adalah keempat industri tersebut memiliki siklus bisnis yang cenderung stabil dengan laba yang juga relatif stabil tiap tahunnya. Bodie, Kane, dan Marcus (2008) membedakan *business cycle* menjadi 2:

- a. *Cyclical industry*: industri yang sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi suatu negara. Industri ini *outperform* pada masa ekspansi, dan *underperform* pada masa resesi. Misal: industri yang memproduksi *durable goods*, barang tahan lama dan pembeliannya dapat ditunda.
- b. *Defensive industry*: industri yang sedikit sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi suatu negara. Industri ini lebih *outperform* dibanding industri lainnya pada masa resesi. Misal: industri farmasi, makanan dan minuman, pengolahan makanan, dan *public utilities*.

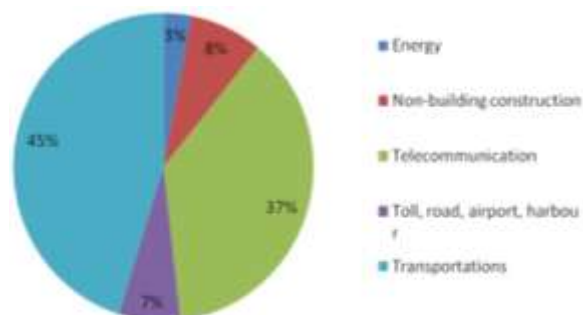
Berdasarkan sampel penelitian, masing-masing jenis industri terdiri dari:



Sumber: Olahan (2011)

Gambar 7. Perusahaan yang Termasuk Consumer Goods Industry

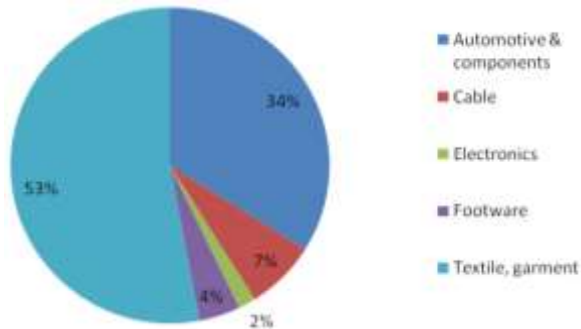
Dari Gambar 7 pemberian kredit bank didominasi perusahaan farmasi dan makanan & minuman, yang merupakan *defensive industry* (Bodie, Kane, dan Marcus 2008), sehingga labanya relatif stabil setiap tahunnya.



Sumber: Olahan (2011)

Gambar 8. Perusahaan yang Termasuk Infrastructure Industry

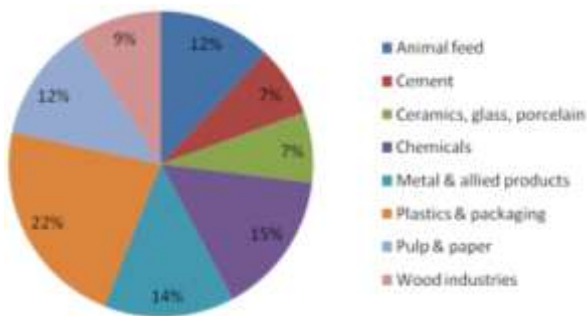
Dari Gambar 8 pemberian kredit bank didominasi perusahaan transportasi (baik darat maupun laut) dan telekomunikasi, yang merupakan *defensive industry* (Bodie, Kane, dan Marcus 2008). Kedua jenis perusahaan ini melayani *public utilities*, sehingga labanya relatif stabil setiap tahunnya.



Sumber: Olahan (2011)

Gambar 9. Perusahaan yang Termasuk *Miscellaneous Industry*

Dari Gambar 9 pemberian kredit bank didominasi perusahaan tekstil-garment dan *automotive*. Untuk perusahaan tekstil-garment lebih banyak didominasi perusahaan pemintalan dan benang (seperti: PT Pan Brothers, PT Apac Citra Centertex dahulu Mayatex, PT Indorama Synthetics) serta pakaian dalam (PT Ricky Putra Globalindo). Perusahaan tersebut lebih berorientasi pada pasar ekspor, sehingga cenderung lebih stabil.



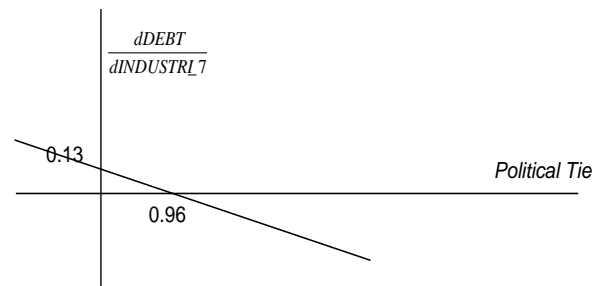
Sumber: Olahan (2011)

Gambar 10. Perusahaan yang Termasuk *Basic Industry*

Dari Gambar 10, pemberian kredit cenderung merata pada beberapa jenis perusahaan. Namun 2 terbesar adalah *plastics & packaging* dan kimia. Bila dilihat dari siklus bisnisnya, perusahaan *plastics & packaging* dan kimia merupakan *defensive industry*. Konsumen perusahaan *plastics & packaging* sebagian besar adalah perusahaan makanan & minuman, sedangkan bahan kimia dibutuhkan hampir di setiap jenis industri.

Hasil pengujian menunjukkan *P*basic industry* dan *P*infrastructure industry* berpengaruh negatif terhadap kredit bank (signifikan pada 5% dan 1%), sedangkan *P*mining industry* berpengaruh positif terhadap kredit bank (signifikan pada 10%). Hal ini berarti *basic* dan *infrastructure industry* memperoleh kredit yang lebih kecil apabila perusahaan tersebut memiliki *political tie*, sedangkan *mining industry* memperoleh kredit yang lebih besar apabila perusahaan memiliki *political tie*.

Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *infrastructure industry* terhadap keputusan pemberian kredit, maka dilakukan pengujian *partial derivative*. Tahap pengujian *partial derivative* pada Tabel 10.



Sumber: Olahan (2012)

Gambar 11. Interaksi antara *Infrastructure Industry* dan *Political Tie*

Berdasarkan Gambar 11, dapat diartikan bahwa adanya *political tie* akan memperkuat (negatif) pengaruh *infrastructure industry* terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain *infrastructure industry* yang memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih rendah. Alasannya adalah karena sebagian besar perusahaan infrastruktur adalah perusahaan BUMN

Tabel 10. Regresi Interaksi *Infrastructure Industry* dan *Political Tie*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	13.406					
POLITICALTIE	-1.322	1.458	-0.361		-0.907	0.365
INDUSTRI_7	0.732	0.241	0.13		3.038	0.002
P*Industri_7	-0.968	0.356	-0.135		-2.721	0.007

Sumber: Olahan (2012)

Tabel 11. Regresi Interaksi *Basic Industry* dan *Political Tie*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.406				
POLITICALTIE	-1.322	1.458	-0.361	-0.907	0.365
INDUSTRI_3	0.428	0.162	0.094	2.635	0.008
P*Industri_3	-0.633	0.277	-0.082	-2.284	0.023

Sumber: Olahan (2012)

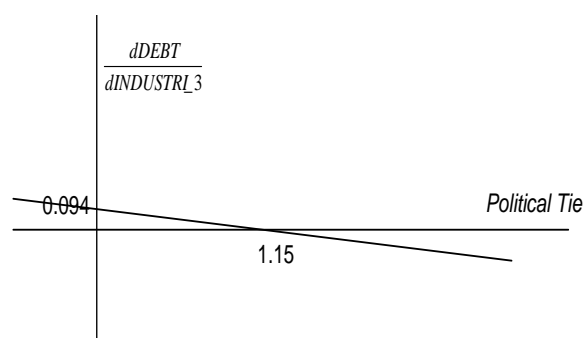
Tabel 12. Regresi Interaksi *Mining Industry* dan *Political Tie*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13.406				
POLITICALTIE	-1.322	1.458	-0.361	-0.907	0.365
INDUSTRI_2	-0.069	0.232	-0.1	-0.296	0.767
P*Industri_2	0.613	0.370	0.058	1.654	0.098

Sumber: Olahan (2012)

(Nahadi dan Sunarsip 2006), sehingga peminjaman sebagian besar didanai bank pemerintah. Akibatnya kredit yang diberikan bank swasta cenderung lebih kecil apabila perusahaan tersebut memiliki *political tie*. Selain itu risiko bisnis infrastruktur yang tinggi, misal: panjangnya jangka waktu proyek, masalah pembebasan lahan, dan potensi munculnya dampak sosial, menyebabkan bank swasta cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan kredit (Nahadi dan Sunarsip 2006).

Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *basic industry* terhadap keputusan pemberian kredit, maka dilakukan pengujian *partial derivative*. Tahap pengujian *partial derivative* pada Tabel 11.



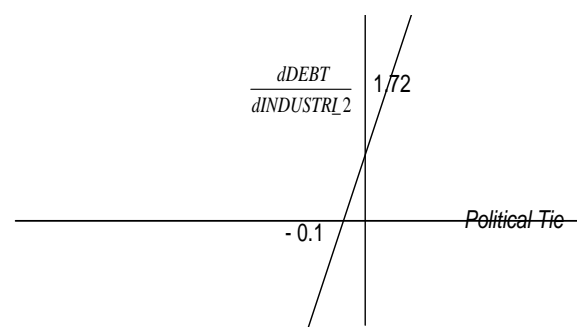
Sumber: Olahan (2012)

Gambar 12. Interaksi antara *Basic Industry* dan *Political Tie*

Berdasarkan Gambar 12, dapat diartikan bahwa adanya *political tie* akan memperkuat (negatif) pengaruh jenis bank terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain *basic industry* yang memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih rendah. Bila dilihat dari data peneliti-

an, *basic industry* yang memiliki *political tie* dan menerima kredit dari bank adalah PT Tjiwi Kimia (kertas), PT Semen Gresik (semen), PT Sorini Agro Asia (kimia), PT Arwana Citramulia (keramik), dan PT Unggul Indah Cahaya (kimia). Perusahaan-perusahaan ini tergolong perusahaan besar dan *profitable* di pasarnya, sehingga ada kemungkinan *demand* perusahaan terhadap kredit bank lebih kecil. Jadi bukan karena industri ini dianggap lebih berisiko oleh perbankan.

Untuk mengetahui apakah *political tie* dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh *mining industry* terhadap keputusan pemberian kredit, maka dilakukan pengujian *partial derivative*. Tahap pengujian *partial derivative* pada Tabel 12.



Sumber: Olahan (2012)

Gambar 13. Interaksi antara *Mining Industry* dan *Political Tie*

Berdasarkan Gambar 13 dapat diartikan bahwa adanya *political tie* akan memperkuat (positif) pengaruh *mining industry* terhadap keputusan pemberian kredit. Dengan kata lain *mining industry* yang memiliki *political tie* akan memperoleh kredit yang lebih tinggi. Alasan yang

mungkin adalah industri *mining* terkait erat dengan politik. Marwan Batubara (www.republika.co.id), seorang pengamat energi, menyatakan bahwa ijin usaha pertambangan di kabupaten meningkat setiap kali terjadi pemilihan kepala daerah. Hal ini juga terjadi di tingkat provinsi. Jadi dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar industri *mining* yang *exist* dan *profitable* memiliki *political tie*, sehingga mereka memperoleh kredit dalam jumlah yang lebih besar

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa:

1. *Non-earnings information* (rasio *financial leverage*) tidak berpengaruh terhadap kredit bank. Alasannya adalah *financial leverage* tidak dapat dianalisis secara independen tanpa memperhatikan rasio *Return-on-asset (ROA)*. Selama *financial leverage* mengalami peningkatan, tetapi masih dalam batas wajar, dan ROA juga menunjukkan peningkatan, maka rasio ROE juga meningkat. Hal ini tentu berbeda apabila peningkatan *financial leverage* tidak diikuti peningkatan ROA. Selain itu analisis siklus bisnis juga turut mempengaruhi penilaian rasio *financial leverage* oleh analisis kredit.
2. *Financial leverage* yang dimoderasi dengan *political tie* menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kredit bank. Alasannya adalah *political tie* tidak dipertimbangkan dalam penilaian *financial leverage*. Jadi *political tie* tidak ada keterkaitan dengan penilaian *financial leverage*.
3. *Earning information* (rasio profitabilitas) berpengaruh negatif terhadap keputusan pemberian kredit. Penjelasannya adalah perusahaan yang mengajukan pinjaman bank dalam jumlah besar adalah perusahaan yang “sakit” atau memiliki profitabilitas yang rendah, sedangkan perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi memperoleh pendanaan dari *retained earnings*, pasar saham, dan pasar obligasi, sehingga ketergantungan pada kredit bank lebih rendah.
4. Perusahaan “sakit” (rasio profitabilitas rendah) yang memiliki *political tie* ternyata lebih diuntungkan, karena mereka memperoleh kredit yang lebih besar dibanding perusahaan “sakit” yang tidak memiliki *political tie* (*rent-seeking hypothesis*). Penyebabnya adalah kondisi Indonesia yang memiliki regulasi institusional yang lemah, merupakan hal yang menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki *political tie*.

Kondisi asimetri informasi yang tinggi turut meningkatkan nilai dari *political tie* yang dimiliki perusahaan. Ternyata kondisi seperti pada rezim Soeharto (Fisman 2001 dan Backman 2001) belum banyak mengalami perubahan pada jaman reformasi seperti sekarang ini.

5. Hasil penelitian ini menunjukkan jenis bank tidak mempengaruhi jumlah kredit yang diberikan, artinya bank pemerintah saat ini lebih efisien dan lebih berhati-hati dalam memberikan kredit. Hal ini terbukti dari masuknya Bank Mandiri, BRI, dan BNI dalam 2000 perusahaan terbaik di dunia versi Forbes Global 2000 pada tahun 2011 (10 perusahaan terbesar di Indonesia).
6. Penelitian ini menemukan bahwa *political tie* yang dimiliki perusahaan pengaruhnya lebih besar di bank swasta dibanding bank pemerintah. Ada beberapa alasan yang mungkin yaitu:
 - a. Bank pemerintah lebih efisien dan lebih berhati-hati (*prudent*) dalam memberikan kredit dibanding bank swasta. Hal ini didukung dengan masuknya 3 bank pemerintah (Mandiri, BRI, dan BNI) dalam 2000 peringkat perusahaan terbesar dan terbaik versi Forbes Global di tahun 2011 (10 peringkat perusahaan terbesar di Indonesia).
 - b. Karakteristik perbankan Indonesia yang cenderung oligopolistik menyebabkan nasabah “kakap” sering memeras bank swasta untuk memberikan bunga yang tinggi. Sebaliknya bank pemerintah cenderung lebih kebal terhadap “pemerasan” ini karena sumber dana bank diperoleh dari tabungan pemerintah. Selain itu jumlah bank swasta jauh lebih banyak dibanding bank pemerintah, sehingga persaingan antar bank swasta juga menjadi lebih tinggi.

Setiap penelitian memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah data kredit bank yang diteliti hanya perusahaan go publik, tidak termasuk perusahaan menengah dan kecil, sehingga penelitian ini tidak dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai keputusan pemberian kredit bank umum di Indonesia. Selain itu data kredit bank tidak diperoleh secara langsung dari bank, melainkan dari laporan keuangan *audited*. Hal ini menyebabkan keakuratan data menjadi lebih rendah. Beberapa laporan keuangan *audited* tidak mencantumkan jangka waktu kredit bank, sehingga tahun perolehan kredit bank didasarkan pada penandatanganan akta notaris yang tercantum di laporan keuangan *audited*. Ada kemungkinan terjadi selisih waktu antara penandatanganan akta dan pencairan

kredit. Keterbatasan lainnya adalah model regresi tidak memenuhi *robustness test*, sehingga ada kemungkinan terjadi bias pada hasil penelitian. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah perusahaan yang diteliti tidak hanya terbatas pada perusahaan *go publik*, tetapi termasuk juga perusahaan menengah dan kecil, sehingga kita dapat memperoleh gambaran keseluruhan mengenai analisis kredit bank umum di Indonesia. Data kredit bank, seperti: pagu kredit, jangka waktu kredit, dan jaminan, sebaiknya diperoleh dari bank yang bersangkutan atau Bank Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian. Saran terakhir adalah menambah jumlah data yang diteliti, agar model regresi memenuhi *robustness test*. Dalam memenuhi model yang *robust*, tidak disarankan untuk membuang outlier karena hal itu bertentangan dengan tujuan dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus (2011). Dari 2000 Perusahaan Terbesar Dunia 2010, 10 Asal Indonesia. www.sekolnet.com diakses tanggal 3 Januari 2012.
- Anonimus (2008). Siapakah Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara?. <http://idtpk.wordpress.com> diakses tanggal 10 April 2010.
- Anonimus (2007). Korupsi Perbankan Paling Besar. www.antikorupsi.org di akses tanggal 11 Desember tahun 2010.
- Bank Indonesia (2010). Regulation of Bank Indonesia No 12/3/PBI Concerning The Application of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Program For Non-Bank Foreign Exchange Traders. www.bi.go.id diakses tanggal 18 April 2011.
- Bank Indonesia (2009). Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. www.bi.go.id diakses tanggal 18 April 2011.
- Bank Indonesia (2005). Peraturan Bank Indonesia No 7/3/PBI Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. www.bi.go.id di akses tanggal 18 April 2011.
- Bodie, Z., Kane, A. & Marcus, A. J. (2009). *Investments (Eighth ed)*. New York: McGraw-Hill.
- Chaney, P.K., Faccio, M. & Parsley, D. (2010). The Quality of Accounting Information in Politically Connected Firms. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- East Asia and Pacific Region of The World Bank (2005). *Report on The Observance of Standards and Codes (ROSC) Republic of Indonesia: Accounting and Auditing* www.bapepam.go.id di akses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Estenson, L. (1996). How a Banker Looks at Financial Leverage. www.uwcc.wisc.edu diakses tanggal 3 Januari 2012.
- Faccio, M. (2010). Differences Between Politically Connected and Non-Connected Firms: A Cross Country Analysis. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Faccio, M. (2002). Politically Connected Firms. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Fisman, R. (2001). Estimating The Value of Political Connections. www2.gsb.columbia.edu diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Foster, G. (1986). *Financial Statement Analysis (Second ed)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Hamada (2008). Bank Borrowing and Financing of Medium-sized Firms in Indonesia. www.ir.ide.go.jp diakses tanggal 2 Maret 2011.
- Hamada, M. & Konishi, M. (2010). Related Lending and Bank Performance: Evidence from Indonesia. www.ide.go.jp diakses tanggal 18 Januari 2011.
- Johnson, S. & Mitton, T. (2003). Cronyism and Capital Control: Evidence from Malaysia. *Journal of Financial Economics*, 67, 351-382.
- Khwaja, A.I. & Mian, A. (2004). Do Lenders Favor Politically Connected Firms? www.ssrn.com diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Laporta, R., Lopez-de-Silanes, F. dan Shleifer, A. (2002). Government Ownership of Banks. *Journal of Finance* No. 57. pp. 256-301.
- Leuz, C. & Oberholzer-gee, F. (2003). Political Relationship, Global Financing and Corporate Transparency. www.fic.wharton.upenn.edu diakses tanggal 2 Juli tahun 2010.
- Megasari, D. (2011). BNI Kelola Dana APBN Dinas Perhubungan Sejumlah Provinsi. <http://keuangan.kontan.co.id> diakses tanggal 15 Februari 2012.
- Nahadi, B. & Sunarsip (2006). Keterlibatan BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur. www.iei.or.id diakses tanggal 5 Januari 2012.
- Palepu, Krishna G., Healy, P. & Bernard, V. (2004). *Business Analysis & Valuation: Using Financial Statements, 3th edition*. Ohio: Thomson.
- Prastowo, N.J. & Chawwa, T. (2009). Kondisi Pasar Keuangan dan Implikasinya terhadap Animo Penerbitan Saham dan Obligasi Korporasi. www.bi.go.id diakses tanggal 23 Desember 2011.

- Rivai, V. & Veithzal, A.P. (2006). *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sharma, S., Durand, R.M. & Gur-Arie, O. (1981). Identification and Analysis of Moderator Variables. *Journal of Marketing Research* (pre-1986), 18, 291-300.
- Tjondro, E. (Nopember 2007). Pengaruh Level of Assurance, Reputasi Kantor Akuntan Publik, Struktur Modal, dan Ukuran Bank Memengaruhi Keputusan Pemberian Kredit Bank *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 52-64.
- Wijaya, K. (2010). *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Yeh, Yin-Hua., Pei-Gi Shu. & Yu-Hui Su. (2010). Political Connection, Corporate Governance and Preferential Bank Loan. <http://papers.ssrn.com> diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.
- Zheng, Y.N. & Zhu, Y. (2009). Bank Lending Incentives and Firm Investment Decisions In China. www.efmaefm.org diakses tanggal 5 Desember tahun 2010.